



Gaya Komunikasi Presiden dan Krisis Legitimasi: Analisis Sentimen Publik terhadap Pemerintahan Indonesia Periode 2024-2026

Azza Vahlevi Attaqi Zamzuri¹, Mutia Zahwa Caroline Oetomo², Karina Eka NurAfifah³, Naufal Hadi Mustofa⁴, Anang Haris Firmansyah⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah,
Jalan Mayor Sujadi No.46 Kudus, Plosokandang, Tulungagung, Jawa Timur,
Indonesia, 66221

Penulis Korespondensi: azzafahlevi2004@gmail.com, zahwacaroline@gmail.com,
karinaeka772@gmail.com, anangharisfirmansyah@uinsatu.ac.id

Abstract.

This study examines the relationship between the communication style of President Prabowo Subianto and the dynamics of public legitimacy during his administration in the 2024–2026 period, with a particular focus on the legitimacy crisis that emerged following the national demonstration wave of August–September 2025. The research departs from an empirical paradox: public satisfaction rates that remained consistently high (77%-80%) throughout 2025 and into early 2026 dropped sharply to 59.75% by mid-2026, concurrent with a decline in public trust toward the central government to 49.02%. The theoretical framework integrates Situational Crisis Communication Theory (Coombs, 2007), Beetham's (1991) sociological concept of legitimacy, and the spiral of silence theory (Noelle-Neumann, 1984) to examine how presidential communication style shapes perceptions of political authority in the digital public sphere. This study employs a qualitative method with a case study approach, analyzing official presidential speech transcripts during critical moments as primary data, supplemented by secondary data comprising national survey results (Indikator Politik Indonesia; Indopol Survey & Consulting), social media big data analysis (Drone Emprit), and relevant academic literature. Qualitative content analysis was applied to categorize presidential communication style into dominant-authoritative and dialogic-accommodative patterns, which were subsequently mapped against digital public sentiment dynamics. Findings reveal that the president's communication style is ambivalent and domain-specific: dialogic-distributive on populist welfare issues, yet dominant-defensive on issues of state accountability for violence. The study identifies a phenomenon termed legitimacy lag, whereby structural erosion of public trust resulting from failed crisis communication strategies only fully manifests months after the triggering events, compounded by accumulated economic pressures. These findings contribute to the extension of SCCT from corporate contexts to presidential political communication, and affirm that strong electoral legitimacy does not guarantee long-term public trust when crisis communication styles fail to adapt to accountability expectations in the social media era.
Keywords: Presidential communication style; legitimacy crisis; public sentiment analysis; crisis communication; Indonesian governance 2024-2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji relasi antara gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan dinamika legitimasi publik pemerintahannya pada periode 2024–2026, dengan fokus pada krisis kepercayaan yang muncul pasca-gelombang demonstrasi nasional Agustus–September 2025. Penelitian bertolak dari paradoks empiris: tingkat kepuasan publik yang konsisten tinggi (77%- 80%) sepanjang 2025 hingga awal 2026 justru anjlok tajam menjadi 59,75% pada pertengahan 2026, bersamaan dengan turunnya kepercayaan terhadap pemerintah pusat ke angka 49,02%. Kajian teoritis mengintegrasikan Situational Crisis Communication Theory (Coombs, 2007), konsep legitimasi sosiologis Beetham (1991), dan teori spiral keheningan (Noelle-Neumann, 1984) untuk membaca bagaimana pilihan gaya komunikasi presiden memengaruhi persepsi keabsahan kekuasaan di ruang publik digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis transkrip pidato resmi presiden pada momen-momen kritis sebagai data primer, serta data sekunder berupa hasil survei nasional (Indikator Politik Indonesia; Indopol Survey & Consulting), analisis big data media sosial (Drone Emprit), dan literatur akademik terkait. Analisis isi kualitatif digunakan untuk mengkategorikan gaya komunikasi presiden ke dalam pola dominan-otoritatif dan pola dialogis-akomodatif, yang kemudian dipetakan terhadap dinamika

Naskah Masuk: 01 Juli 2026; Revisi: 01 Juli 2026; Diterima: 01 Juli 2026; Terbit: 02 Juli 2026.

sentimen publik digital. Hasil penelitian menunjukkan gaya komunikasi presiden bersifat ambivalen dan domain-spesifik: dialogis-distributif pada isu kesejahteraan populis, namun dominan-defensif pada isu akuntabilitas atas kekerasan negara. Penelitian ini mengidentifikasi fenomena jeda legitimasi (*legitimacy lag*), yakni erosi kepercayaan struktural akibat kegagalan strategi komunikasi krisis yang baru termanifestasi penuh beberapa bulan setelah peristiwa, bersamaan dengan akumulasi tekanan ekonomi. Temuan ini berkontribusi pada perluasan SCCT dari konteks korporasi ke komunikasi politik presidensial, serta menegaskan bahwa legitimasi elektoral yang kuat tidak menjamin ketahanan kepercayaan publik jangka panjang apabila gaya komunikasi krisis gagal beradaptasi dengan ekspektasi akuntabilitas di era media sosial.

Kata kunci: *Gaya Komunikasi Presiden; krisis legitimasi; analisis sentiment publik; Komunikasi Krisis; pemerintahan Indonesia 2024-2026*

1. LATAR BELAKANG

Pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024 menandai babak baru komunikasi politik Indonesia. Berbekal modal elektoral terbesar dalam sejarah pemilihan presiden langsung Indonesia mendapat 58,6% suara atau sekitar 96 juta pemilih pemerintahan Prabowo-Gibran memulai masa jabatannya dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2025 mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 79,35%, sebuah capaian yang melampaui tingkat kepuasan awal dua presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, pada periode setara masa jabatan mereka. Modal politik tersebut tampak bertahan stabil sepanjang tahun pertama pemerintahan; survei evaluasi satu tahun pada Oktober 2025 masih mencatat angka 77,7%, dan survei Januari 2026 bahkan menunjukkan kenaikan tipis menjadi 79,9%, didorong oleh persepsi positif terhadap pemberantasan korupsi dan program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, di balik narasi stabilitas elektoral tersebut, periode yang sama juga diwarnai oleh krisis legitimasi paling serius dalam pemerintahan Prabowo: gelombang demonstrasi nasional pada akhir Agustus hingga awal September 2025 yang dipicu oleh kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR senilai Rp50 juta per bulan, dan mengalami eskalasi dramatis setelah pengemudi ojek daring Affan Kurniawan tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta. Insiden tersebut memicu kemarahan publik yang meluas ke lebih dari 20 kota, menimbulkan sepuluh korban jiwa dan ribuan korban kekerasan aparat, serta memunculkan tagar viral seperti #polisipembunuh yang didominasi sentimen negatif di media sosial. Dalam merespons krisis tersebut, Presiden Prabowo menggelar dua pernyataan resmi di Istana Merdeka pada 31 Agustus 2025, yang alih-alih menyampaikan permohonan maaf atas jatuhnya korban jiwa justru menyebut sebagian aksi mengarah pada "makar dan terorisme". Analisis kebahasaan yang dilakukan media nasional terhadap pidato tersebut menemukan dominasi kata ganti "kita" dan "saya", yang oleh pakar komunikasi politik dimaknai sebagai upaya membangun solidaritas kolektif sekaligus sentralisasi otoritas personal, tanpa disertai pengakuan kesalahan institusional.

Paradoks antara tingkat kepuasan agregat yang tetap tinggi pasca-krisis (Januari 2026: 79,9%) dan anjloknya kepercayaan publik beberapa bulan kemudian survei Indopol Mei–Juni 2026 mencatat penurunan tajam menjadi 59,75%, dengan kepercayaan terhadap pemerintah pusat hanya 49,02% menyiratkan adanya jeda waktu (*lag*) antara peristiwa komunikasi krisis dan materialisasi penurunan legitimasi, yang kemungkinan diperparah oleh akumulasi tekanan ekonomi (harga kebutuhan pokok, pelemahan rupiah) pada paruh pertama 2026. Fenomena inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini: bagaimana gaya

komunikasi presiden dalam merespons krisis turut membentuk atau mengikis legitimasi pemerintahan, di tengah lanskap opini publik yang kian dimediasi oleh platform digital.

Kajian komunikasi krisis pemerintah di Indonesia selama ini didominasi oleh dua arus literatur yang berjalan terpisah. Pertama, studi-studi yang menerapkan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) pada konteks korporasi atau lembaga teknis (kebocoran data, krisis layanan publik, manajemen reputasi BUMN), yang menekankan pada efektivitas strategi rebuild dan bolstering, tetapi jarang menyentuh ranah komunikasi politik presidensial yang melibatkan pertarungan legitimasi negara. Kedua, studi-studi sentimen publik berbasis big data media sosial (misalnya pemetaan Drone Emprit atas isu-isu viral) yang kaya secara deskriptif namun umumnya berhenti pada pelaporan tren tanpa dikaitkan secara eksplisit dengan kerangka teori legitimasi politik atau dianalisis bersama teks pidato presiden secara sistematis. Penelitian terdahulu tentang opini publik digital periode 2025, seperti kajian konstruksi opini publik di media sosial sepanjang April–Agustus 2025, menemukan adanya disonansi antara agenda pemerintah dan wacana publik, tetapi belum secara spesifik membedah bagaimana pilihan gaya komunikasi presiden defensif versus akomodatif berkorelasi dengan pergeseran indikator legitimasi terukur (tingkat kepuasan, tingkat kepercayaan institusional) lintas waktu.

Gap penelitian yang teridentifikasi dengan demikian bersifat ganda: (1) kelangkaan studi yang menjembatani analisis isi pidato presiden dengan data sentimen digital secara terintegrasi dalam satu desain studi kasus, dan (2) absennya kajian yang menempatkan paradoks "kepuasan tinggi tetapi legitimasi rapuh" pada pemerintahan Prabowo sebagai unit analisis eksplisit, padahal fenomena ini berpotensi menjadi kasus penting bagi teori legitimasi politik di era post-truth dan demokrasi bermedia sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan mengategorikan pola gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto dalam merespons isu-isu krisis nasional periode 2024–2026; (2) memetakan dinamika sentimen publik digital yang menyertai momen-momen komunikasi tersebut menggunakan data sekunder yang telah dipublikasikan secara ilmiah maupun oleh lembaga riset kredibel; dan (3) menganalisis relasi antara pola gaya komunikasi tersebut dengan indikator legitimasi terukur (tingkat kepuasan dan kepercayaan publik) untuk merumuskan proposisi teoritis tentang mekanisme erosi legitimasi pada pemerintahan dengan modal elektoral besar.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan analisis isi kualitatif atas teks pidato presiden dengan data sentimen publik digital yang bersumber dari lembaga riset independen (Indikator Politik Indonesia, Indopol Survey & Consulting, Drone Emprit) dalam satu kerangka studi kasus longitudinal, sebuah pendekatan yang relatif jarang ditemukan dalam literatur komunikasi politik Indonesia kontemporer. Kedua, penelitian ini secara eksplisit mendokumentasikan dan menganalisis fenomena "jeda legitimasi" (legitimacy lag) di mana indikator kepuasan agregat tetap bertahan tinggi pascakrisis komunikasi sebelum akhirnya terkoreksi tajam beberapa bulan kemudian sebagai kontribusi konseptual baru pada diskusi SCCT dalam konteks politik (berbeda dari konteks korporasi yang biasanya menunjukkan dampak segera). Ketiga, penelitian ini menempatkan kasus pemerintahan Prabowo 2024–2026 sebagai studi kasus mutakhir yang belum banyak dikaji secara akademik mendalam mengingat rentang waktunya yang baru berlalu.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Situational Crisis Communication Theory (SCCT)

Coombs (2007) mengembangkan SCCT untuk menjelaskan bagaimana organisasi termasuk lembaga pemerintah semestinya memilih strategi respons krisis berdasarkan tingkat atribusi tanggung jawab yang dipersepsikan publik. Pada krisis dengan atribusi tanggung jawab rendah (*correctable crisis*), strategi penyangkalan atau pengalihan dapat diterima; namun pada krisis dengan atribusi tanggung jawab tinggi (*preventable crisis*) misalnya kekerasan aparat negara terhadap warga sipil, SCCT memprediksi bahwa strategi rebuild (permintaan maaf, kompensasi, perbaikan) jauh lebih efektif menjaga reputasi dibandingkan strategi defensif seperti penyangkalan atau pengkambinghitaman pihak lain. Coombs dan Schmidt (2000) lebih jauh menegaskan bahwa reputasi berkorelasi langsung dengan legitimasi: organisasi atau pemerintah mempertahankan hak untuk eksis di mata publik sepanjang reputasinya tetap positif, sehingga kegagalan strategi komunikasi krisis berisiko langsung mengikis legitimasi, bukan sekadar citra.

2.2 Legitimasi Politik dan Spiral Keheningan

Konsep legitimasi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada gagasan Beetham (1991) bahwa kekuasaan dianggap sah bukan semata karena kemenangan elektoral formal, melainkan karena kesesuaian berkelanjutan antara tindakan penguasa dengan norma dan ekspektasi yang dipegang publik (*normative justifiability*), serta adanya bukti persetujuan aktif dari yang diperintah (*expressed consent*). Dengan kerangka ini, kemenangan elektoral 58,6% suara pada 2024 hanya menjadi titik awal legitimasi, bukan jaminan permanen; legitimasi harus terus-menerus direproduksi melalui tindakan dan komunikasi yang konsisten dengan ekspektasi publik, terutama pada momen krisis yang menguji kesesuaian normatif tersebut.

Sebagai pelengkap, teori spiral keheningan (Noelle-Neumann, 1984) relevan untuk membaca dinamika opini publik digital: individu cenderung menyuarakan pendapat ketika mempersepsikan diri berada dalam opini mayoritas, dan diam ketika merasa minoritas. Viralitas tagar seperti #polisipembunuh dan #IndonesiaGelap pada 2025 dapat dibaca sebagai pembalikan spiral keheningan di ruang digital di mana anonimitas dan algoritma platform memungkinkan suara kritis terhadap pemerintah justru terakumulasi dan terlihat sebagai arus utama, berbeda dari pola spiral keheningan klasik di ruang publik konvensional yang cenderung membungkam minoritas.

2.3 Penelitian Terdahulu dan Perbandingan

Setidaknya empat kelompok penelitian lima tahun terakhir relevan dibandingkan dengan penelitian ini. Pertama, kajian SCCT pada lembaga publik teknis menunjukkan bahwa strategi rebuild dan bolstering efektif memulihkan reputasi pada krisis seperti kebocoran data Pusat Data Nasional, karena krisis tersebut tergolong *preventable crisis* yang menuntut akuntabilitas tinggi pola dukungan yang relevan namun belum diuji pada konteks komunikasi presidensial berskala nasional. Kedua, studi konstruksi opini publik melalui media sosial periode April-Agustus 2025 mengonfirmasi adanya disonansi antara agenda pemerintah dan wacana publik digital, namun analisisnya bersifat deskriptif-tematik dan tidak mengukur korelasinya dengan indikator legitimasi terukur seperti tingkat kepuasan survei. Ketiga, kajian sosio-legal atas represi aparat

selama demonstrasi Agustus 2025 mendokumentasikan secara rinci pelanggaran HAM (3.337-4.453 orang ditangkap di 20 kota, 744 kasus kekerasan fisik, 10 korban jiwa) namun berfokus pada aspek hukum pidana dan HAM, bukan pada analisis gaya komunikasi presiden sebagai variabel penjelas. Keempat, riset komunikasi krisis pemerintah pada masa pandemi Covid-19 menyimpulkan bahwa kelambanan dan inkonsistensi pesan pemerintah memperburuk kepercayaan publik, temuan yang secara struktural sejalan dengan pola yang ditemukan penelitian ini, namun dalam konteks krisis kesehatan, bukan krisis kekerasan politik.

Dibandingkan keempat arus tersebut, penelitian ini berbeda karena secara eksplisit menjadikan pidato dan pernyataan presiden sebagai data primer, memadukannya dengan data sentimen digital riil dari lembaga independen, dan mengaitkan keduanya secara longitudinal dengan tren survei kepuasan publik dari tiga periode berbeda untuk mengungkap pola jeda legitimasi yang belum banyak didokumentasikan dalam literatur Indonesia.

2.4 Kerangka Analisis

Berdasarkan kajian di atas, penelitian ini menyusun kerangka analisis dua dimensi: (a) dimensi gaya komunikasi, dikategorikan ke dalam pola dominan-otoritatif (penekanan otoritas personal, atribusi kesalahan ke pihak luar, minim permintaan maaf) versus pola dialogis-akomodatif (pengakuan kesalahan, keterbukaan dialog, kompensasi konkret); dan (b) dimensi respons publik, dipetakan melalui sentimen digital positif, negatif, dan netral serta indikator survei kepuasan dan kepercayaan dari waktu ke waktu.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Janis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study), yang dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam atas fenomena kontemporer gaya komunikasi presiden dan respons legitimasi publik dalam konteks kehidupan nyata yang batasannya antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas (Yin, 2018). Unit analisis adalah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode Oktober 2024 hingga Juni 2026, dengan fokus mendalam pada episode kritis demonstrasi Agustus - September 2025 sebagai kasus inti (critical case), serta dua episode pembandingan: respons terhadap program populis MBG dan respons terhadap tekanan ekonomi pertengahan 2026.

3.2 Sumber Data

Data primer penelitian berupa transkrip pidato dan pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto dalam merespons isu nasional periode 2024-2026, terutama pidato kenegaraan RAPBN 2026 (15 Agustus 2025) dan keterangan pers di Istana Merdeka (31 Agustus 2025) yang diperoleh dari dokumentasi resmi Sekretariat Negara dan transkripsi media nasional (Tempo, Kompas). Data sekunder mencakup: (a) hasil survei nasional dari Indikator Politik Indonesia dan Indopol Survey & Consulting periode Januari 2025-Juni 2026; (b) hasil analisis big data media sosial dari Drone Emprit terkait isu-isu krisis (demonstrasi Agustus 2025, kematian Affan Kurniawan); (c) artikel jurnal ilmiah dan laporan lembaga (Komnas HAM, YLBHI, KontraS) terkait dampak krisis; serta (d) liputan dan analisis media arus nasional sebagai pelengkap konteks. Penelitian ini tidak

melakukan pengumpulan data primer komentar netizen maupun wawancara baru dengan pengamat politik; seluruh klaim mengenai sentimen publik digital didasarkan pada hasil analisis yang telah dipublikasikan oleh lembaga riset independen, sebagai bentuk kehati-hatian metodologis untuk menghindari rekonstruksi data yang tidak dapat diverifikasi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

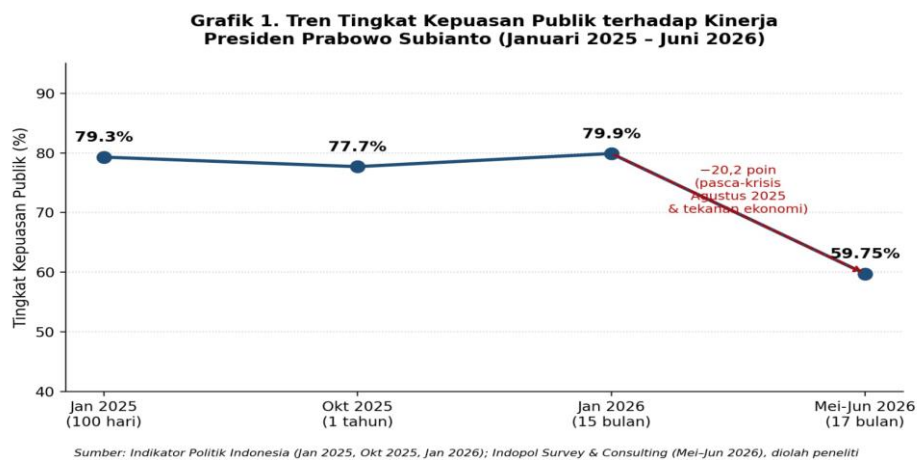
Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (documentary research) dan penelusuran pustaka sistematis atas publikasi resmi pemerintah, rilis hasil survei lembaga riset, publikasi akademik dalam basis data jurnal nasional, serta pemberitaan media yang memenuhi kriteria kredibilitas jurnalistik. Penelusuran difokuskan pada periode Oktober 2024 -Juni 2026 dengan kata kunci yang mencakup nama presiden, peristiwa krisis spesifik, dan istilah terkait survei kepuasan publik.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) menurut Krippendorff (2018) untuk mengkategorikan unit-unit teks pidato presiden ke dalam kategori gaya komunikasi yang telah ditetapkan pada kerangka analisis. Proses koding dilakukan dengan tiga tahap: (1) reduksi data melalui identifikasi unit makna dalam transkrip pidato; (2) kategorisasi unit makna ke dalam pola dominan-otoritatif atau dialogis-akomodatif, termasuk identifikasi pemilihan diksi (frekuensi kata ganti, label terhadap aktor kritis, kehadiran/ketiadaan permohonan maaf); dan (3) triangulasi temuan kategorisasi dengan data sentimen digital sekunder serta tren indikator survei kepuasan dan kepercayaan publik untuk memetakan dinamika hubungan keduanya secara naratif-deskriptif. Triangulasi sumber (data pidato, data sentimen digital, dan data survei) digunakan untuk meningkatkan kredibilitas temuan, sejalan dengan prinsip trustworthiness penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 1985).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tren Legitimasi: Paradoks Kepuasan Tinggi Dan Kerapuran Kepercayaan Analisis Data



Grafik 1. Tren Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Prabowo Subianto (Jan 2025–Jun 2026). Sumber: Indikator Politik Indonesia; Indopol Survey & Consulting, diolah peneliti.

Grafik 1 menyajikan tren tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto pada empat titik waktu pengukuran. Data menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif stabil tinggi sepanjang Januari 2025 hingga Januari 2026 berkisar 77,7% hingga 79,9% sebelum mengalami penurunan tajam sebesar 20,2 poin persentase pada survei Indopol Mei-Juni 2026 menjadi 59,75%. Penurunan ini bukan sekadar fluktuasi statistik biasa; lembaga survei yang bersangkutan menilai kondisi tersebut mencerminkan fase *political vulnerability* yang nyata, mengingat tingkat kepuasan tahun kedua pemerintahan idealnya berada di atas 70% untuk menjamin stabilitas dukungan. Temuan ini menjadi bukti empiris pertama bagi argumen sentral penelitian: legitimasi yang tampak kokoh berdasarkan ukuran agregat jangka pendek dapat menyembunyikan akumulasi keretakan kepercayaan yang baru termanifestasi setelah jeda waktu tertentu.

Penaikan tingkat kepuasan publik dari 77,7% pada Oktober 2025 menjadi 79,9% pada Januari 2026 tergolong moderat, namun data survei Indikator Politik Indonesia menyediakan beberapa penjelasan yang cukup spesifik mengenai kenaikan tersebut. Penjelasan paling kuat yang teridentifikasi dalam rilis survei adalah efek peredam dari kebijakan bantuan sosial pascakrisis Agustus 2025. Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa kepuasan publik turut ditopang oleh penyaluran bantuan sosial pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang ia kaitkan secara eksplisit dengan dinamika sosial-politik pascademonstrasi Agustus 2025. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah secara sengaja memperbesar penyaluran bantuan sebagai respons terhadap gejolak sosial yang terjadi, sebagai upaya meredam ketidakpuasan publik. Temuan ini konsisten dengan pola gaya komunikasi dialogis-distributif pemerintah pada domain kesejahteraan sebagaimana dipetakan dalam penelitian ini, di mana kebijakan bantuan sosial tampak difungsikan sebagai instrumen pemulihan citra pascakrisis komunikasi yang bersifat represif.

Faktor kedua adalah konsolidasi persepsi publik atas keseriusan pemberantasan korupsi, yang menjadi alasan kepuasan dengan persentase tertinggi (17,5%) pada survei Januari 2026 meningkat posisinya dari sebelumnya menempati urutan kedua (19,5%) pada survei Oktober 2025, meski tetap menjadi salah satu alasan dominan pada kedua periode pengukuran. Temuan ini mengindikasikan bahwa narasi ketegasan terhadap korupsi berfungsi sebagai fondasi kepuasan yang relatif stabil dan secara konsisten dipertahankan sepanjang periode tersebut.

Faktor ketiga adalah efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tingkat kesadaran publiknya sangat tinggi 94% publik mengetahui atau pernah mendengar program tersebut menurut survei Oktober 2025—dengan tingkat kepuasan mencapai 72,8% pada Januari 2026, dan Generasi Z sebagai kelompok pendukung terbesar (80,7% menyatakan puas). Burhanuddin Muhtadi menegaskan bahwa program-program hasil cepat semacam ini memberikan pengaruh positif terhadap evaluasi publik atas kinerja presiden, sehingga semakin lama program berjalan dan semakin luas jangkauannya, semakin besar pula kontribusinya terhadap angka kepuasan agregat.

Faktor keempat, yang bersifat lebih struktural, adalah kekuatan basis dukungan elektoral sejak awal pemerintahan. Modal elektoral sebesar 96 juta pemilih (58,6% suara) rekor tertinggi dibandingkan presiden-presiden sebelumnya beserta dukungan eksplisit dari mantan Presiden Joko Widodo, dinilai turut memengaruhi tingginya tingkat kepuasan publik yang bertahan. Profil pendukung yang didominasi Generasi Z juga tidak mengalami perubahan signifikan dari pola dukungan elektoral 2024, sehingga terdapat basis loyalitas struktural yang relatif stabil terlepas dari dinamika krisis temporer yang terjadi.

Sebagai catatan kehati-hatian metodologis yang perlu dicantumkan secara eksplisit dalam penelitian ini, kenaikan dari 77,7% menjadi 79,9% tergolong relatif kecil (2,2 poin persentase) dan masih berada dalam rentang margin of error survei (sekitar $\pm 2,9\%$), sehingga secara statistik belum dapat disimpulkan secara meyakinkan sebagai tren kenaikan yang signifikan melainkan berpotensi merupakan fluktuasi normal di sekitar level kepuasan yang telah stabil tinggi. Yang secara naratif lebih signifikan untuk dianalisis adalah bagaimana angka yang tampak stabil hingga awal 2026 tersebut justru mengalami penurunan tajam beberapa bulan kemudian (Mei-Juni 2026), sebuah pola yang memperkuat proposisi jeda legitimasi (*legitimacy lag*) dalam penelitian ini yakni bahwa efek pemulihan citra melalui bantuan sosial dan program hasil cepat bersifat jangka pendek dan tidak menjangkau akar ketidakpuasan struktural, baik berupa tekanan ekonomi rumah tangga maupun residu kemarahan publik pascademonstrasi 2025.

Penurunan tajam tingkat kepuasan publik pada periode Mei-Juni 2026 dari 79,9% pada Januari 2026 menjadi 59,75% menurut survei Indopol Survey & Consulting tidak dapat dijelaskan oleh satu peristiwa tunggal, melainkan merupakan hasil akumulasi dua tekanan yang berkonvergensi pada rentang waktu yang relatif berdekatan.

Faktor pertama, dan yang paling dominan berdasarkan data survei, adalah tekanan ekonomi riil yang dirasakan langsung oleh rumah tangga. Survei Indopol mencatat bahwa sebanyak 34,14% responden yang menyatakan ketidakpuasan menunjuk harga beras, minyak, dan bahan bakar minyak yang belum terkendali sebagai alasan utama, sementara 37,48% publik menyatakan kondisi ekonomi keluarganya memburuk dibandingkan setahun sebelumnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketidakpuasan pada periode tersebut bersifat *pocketbook economics* penilaian berbasis kondisi ekonomi personal ketimbang evaluasi abstrak atas kinerja pemerintah secara umum. Periode yang sama juga diwarnai pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan pada Indeks Harga Saham Gabungan, yang turut mendorong munculnya ultimatum 18 hari dari elemen mahasiswa pada awal Juni 2026 serta menghidupkan kembali wacana "Reformasi Jilid 2" di ruang publik digital.

Faktor kedua adalah fenomena yang dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai jeda legitimasi (*legitimacy lag*). Krisis represi aparat selama demonstrasi Agustus - September 2025 ditandai oleh kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan, ribuan korban kekerasan aparat, serta pelabelan presiden atas sebagian aksi sebagai "makar dan terorisme" tanpa disertai permintaan maaf eksplisit tidak serta-merta tercermin dalam penurunan kepuasan jangka pendek, sebagaimana ditunjukkan oleh angka survei Oktober 2025 dan Januari 2026 yang masih tinggi (masing-masing 77,7% dan 79,9 %). Namun demikian, ingatan kolektif atas peristiwa tersebut tampak tetap melekat dan kembali termanifestasi

ketika muncul pemicu tekanan baru berupa krisis ekonomi, sebagaimana terindikasikan dari kemunculan kembali wacana "Reformasi Jilid 2" yang secara eksplisit merujuk pada memori demonstrasi 2025. Dengan demikian, dapat diargumentasikan bahwa krisis komunikasi pada 2025 telah mengikis cadangan kepercayaan struktural publik, sekalipun belum tercermin pada indikator kepuasan kinerja permukaan, sehingga ketika muncul tekanan ekonomi baru, cadangan kepercayaan tersebut tidak lagi memadai untuk menahan laju penurunan persepsi legitimasi.

Data yang memperkuat argumen mengenai keretakan struktural ini adalah temuan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah pusat pada periode yang sama hanya mencapai 49,02 % belum melampaui separuh populasi sementara penilaian publik atas kinerja pemerintah pusat secara keseluruhan nyaris berimbang, yakni 51,06% positif berbanding 48,95% negatif. Direktur Eksekutif Indopol Survey & Consulting, Ratno Sulistiyanto, menilai selisih yang tipis tersebut mencerminkan kerapuhan legitimasi pemerintah pada periode itu, dan menegaskan bahwa secara ideal tingkat kepuasan pada tahun kedua pemerintahan semestinya berada pada kisaran di atas 70 persen guna menjamin stabilitas dukungan publik.

Sebagai catatan metodologis yang perlu ditegaskan demi kehati-hatian akademik, data penurunan tajam ini bersumber dari satu lembaga survei (Indopol Survey & Consulting, periode Mei–Juni 2026) yang menunjukkan tren berbeda cukup signifikan dibandingkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada bulan sebelumnya. Mengingat belum ditemukannya hasil survei dari lembaga independen lain pada periode yang persis sama untuk keperluan triangulasi silang, terdapat kemungkinan bahwa perbedaan metodologis mencakup desain sampel, cakupan wilayah, maupun formulasi pertanyaan survei turut berkontribusi terhadap besarnya selisih temuan tersebut, di samping kemungkinan pergeseran opini publik yang sesungguhnya terjadi. Keterbatasan ini perlu dicantumkan secara eksplisit dalam bagian keterbatasan penelitian guna menjaga validitas interpretasi data. Pola jeda ini relevan dibaca melalui konsep legitimasi Beetham (1991): kepuasan kinerja jangka pendek lebih banyak mencerminkan penilaian instrumental atas manfaat langsung (bantuan sosial, program populis), sedangkan kepercayaan institusional yang lebih dalam yang anjlok hingga di bawah separuh populasi (49,02%) pada pertengahan 2026 mencerminkan evaluasi normatif yang lebih mendalam atas kesesuaian tindakan pemerintah dengan ekspektasi keadilan dan akuntabilitas, termasuk memori kolektif atas penanganan represif terhadap demonstrasi Agustus 2025 dan kegagalan memenuhi sejumlah tuntutan reformasi yang sempat dijanjikan.

4.2 Ekonomi Krisis: Gaya Kamunikasi Pada Demonstrasi Agustus-September 2025

Tabel 1 merangkum tiga momen komunikasi presiden yang paling banyak disorot selama episode krisis demonstrasi Agustus–September 2025, dikategorikan menurut kerangka analisis penelitian.

Tabel 1. Pemetaan Gaya Komunikasi Presiden pada Episode Krisis Demonstrasi Agustus–September 2025

Tanggal	Konteks	Kategori Gaya Komunikasi	Elemen Kunci
15 Agustus 2025	Pidato kenegaraan RAPBN 2026 di hadapan DPR/MPR	Dominan-otoritatif (awal)	Tidak menyinggung secara langsung sensitivitas kenaikan tunjangan DPR; momentum dimanfaatkan anggota DPR untuk berjoget, memicu kemarahan publik
31 Agustus 2025	Keterangan pers di Istana Merdeka bersama ketua umum partai politik	Dominan-otoritatif	Penekanan kata "kita" dan "saya"; menyebut sebagian aksi mengarah pada "makar dan terorisme"; tanpa permintaan maaf eksplisit atas korban jiwa
1-3 September 2025	Tindak lanjut: pencabutan tunjangan DPR, moratorium kunjungan luar negeri	Bergeser ke akomodatif-parsial	Konsesi kebijakan konkret diumumkan, namun datang dari pimpinan DPR, bukan presiden; permintaan maaf disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, bukan presiden

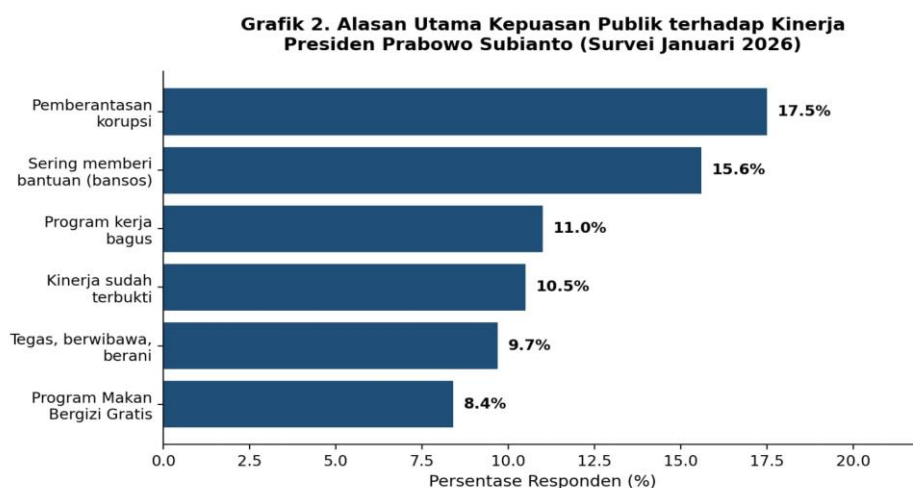
Sumber: diolah peneliti dari Tempo.co (2025), KBR.ID (2025), dan The Conversation Indonesia (2025).

Analisis isi terhadap dua pidato utama Presiden Prabowo pada periode krisis (15 dan 31 Agustus 2025) menemukan pola yang konsisten dengan kategori dominan-otoritatif. Analisis frekuensi kata yang dilakukan media nasional terhadap kedua pidato menemukan dominasi kata ganti "kita" dan "saya" dibandingkan kata-kata substantif lain. Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, menafsirkan dominasi tersebut sebagai pola yang secara simbolik inklusif melalui kata "kita", namun secara simultan mengandung sentralisasi otoritas personal melalui kata "saya" sebuah kombinasi yang berpotensi, menurutnya, berfungsi menghindarkan presiden dari pengakuan kesalahan institusional atas tragedi yang terjadi.

Yang paling signifikan secara teoritis adalah ketiadaan permintaan maaf eksplisit dari presiden atas jatuhnya korban jiwa, termasuk kematian Affan Kurniawan, dan pemilihan diksi yang melabeli sebagian aksi demonstrasi sebagai makar dan terorisme. Dari perspektif SCCT (Coombs, 2007), insiden kekerasan aparat terhadap warga sipil tergolong preventable crisis dengan atribusi tanggung jawab tinggi, yang menuntut strategi rebuild permintaan maaf, kompensasi, dan komitmen perbaikan struktural untuk memulihkan reputasi secara efektif. Alih-alih demikian, gaya komunikasi presiden lebih dekat pada strategi defensif (deny dan diminish dalam taksonomi Coombs), yang menurut prediksi teori justru berisiko memperburuk persepsi tanggung jawab institusional di mata publik, bukan meredakannya. Analisis menilai langkah ini gagal mengoreksi narasi brutalitas aparat dan tidak menjawab standar hak asasi manusia internasional, sehingga alih-alih meredam kemarahan publik, justru berisiko memicu eskalasi

lanjutan sebagaimana terbukti dari catatan penangkapan gas air mata terhadap mahasiswa yang masih terjadi pascapidato presiden.

4.3 Sentimen Digital: Pembalikan Spiral Keheningan



Grafik 2. Alasan Utama Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Prabowo Subianto (Survei Januari 2026). Sumber: Indikator Politik Indonesia, diolah peneliti.

Analisis big data media sosial yang dilakukan Drone Emprit pada periode kritis 28-29 Agustus 2025 menemukan bahwa percakapan warganet terkait insiden tertabraknya Affan Kurniawan oleh kendaraan taktis Brimob didominasi sentimen negatif, dengan tagar #polisipembunuh menjadi topik trending lintas platform (X dan TikTok). Direktur Eksekutif Drone Emprit, Ismail Fahmi, mencatat bahwa narasi dominan dalam percakapan tersebut menyertakan tuduhan bahwa aparat "sengaja melindas tanpa mengurangi kecepatan" dan ketidakpercayaan luas terhadap institusi kepolisian. Pola ini berbeda mencolok dengan temuan pembandingan pada isu populis: survei Indikator Politik Indonesia Januari 2026 mencatat 72,8% publik puas terhadap pelaksanaan program MBG, dengan tingkat kepuasan tertinggi pada kelompok Generasi Z (80,7%) menunjukkan bahwa sentimen publik terhadap pemerintahan Prabowo bersifat terbelah secara isu (issue-specific), bukan monolitik.

Grafik 2 menampilkan enam alasan utama kepuasan publik terhadap kinerja presiden berdasarkan survei Januari 2026, dengan pemberantasan korupsi (17,5%) dan distribusi bantuan sosial (15,6%) sebagai dua faktor dominan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa basis legitimasi pemerintahan Prabowo bertumpu kuat pada politik distributif dan citra ketegasan personal, namun relatif rapuh ketika dihadapkan pada isu akuntabilitas struktural seperti kekerasan aparat domain di mana gaya komunikasi otoritatif presiden justru kontraproduktif. Dibaca melalui teori spiral keheningan (Noelle-Neumann, 1984), viralitas #polisipembunuh dapat dimaknai sebagai pembalikan logika spiral klasik: anonimitas dan struktur algoritmik media sosial memungkinkan opini kritis terhadap negara yang dalam konteks otoriter konvensional cenderung dibungkam oleh ketakutan terisolasi secara sosial justru terakumulasi cepat dan tervisualisasi

sebagai arus opini mayoritas digital, mendesak pemerintah merespons dalam hitungan hari, bukan minggu.

4.4 Insight Utama dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini menghasilkan tiga insight utama. Pertama, ditemukan adanya pola ambivalensi gaya komunikasi presiden yang bersifat domain-spesifik: dialogis-distributif pada isu kesejahteraan populis, namun dominan-defensif pada isu akuntabilitas atas kekerasan negara. Ambivalensi ini menjelaskan mengapa indikator kepuasan kinerja secara umum dapat bertahan tinggi meski terjadi krisis legitimasi serius pada domain tertentu publik tampak mengompartementalisasi penilaiannya antara presiden yang peduli kesejahteraan dan negara yang represif terhadap kritik.

Kedua, penelitian ini mengonfirmasi secara empiris adanya fenomena jeda legitimasi (*legitimacy lag*): efek erosi kepercayaan akibat gaya komunikasi krisis yang defensif tidak serta-merta tercermin dalam survei kepuasan jangka pendek, melainkan terakumulasi dan baru termanifestasi penuh setelah berbulan-bulan, bersamaan dengan munculnya tekanan struktural tambahan (ekonomi). Temuan ini memperluas SCCT yang umumnya diuji pada konteks krisis korporasi dengan siklus reputasi yang relatif cepat ke konteks politik presidensial, di mana legitimasi tampaknya memiliki daya tahan jangka pendek yang lebih besar namun tetap rentan terkoreksi tajam ketika akumulasi ketidakpuasan mencapai titik kritis.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa di era media sosial, kegagalan strategi rebuild pada krisis akuntabilitas tinggi tidak hanya berisiko pada citra jangka pendek, tetapi terdokumentasikan secara permanen dalam jejak digital (tagar, analisis big data) yang dapat terus diakses dan diaktivasi oleh publik pada krisis-krisis berikutnya—sebagaimana tampak dari kemunculan kembali wacana Reformasi Jilid 2 pada Juni 2026 yang merujuk kembali pada ingatan kolektif demonstrasi Agustus 2025. Implikasinya, kontribusi praktis penelitian ini bagi komunikasi kepresidenan adalah pentingnya strategi rebuild yang eksplisit dan tepat waktu pada krisis dengan atribusi tanggung jawab tinggi, alih-alih mengandalkan ketegasan personal dan politik distributif semata sebagai bantalan legitimasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto pada periode 2024–2026 bersifat ambivalen dan domain-spesifik: cenderung dialogis-distributif pada isu kesejahteraan populis namun dominan-defensif pada isu krisis akuntabilitas negara, khususnya dalam merespons gelombang demonstrasi dan kekerasan aparat Agustus–September 2025. Pola gaya komunikasi defensif tersebut—ditandai oleh ketiadaan permintaan maaf eksplisit dan pelabelan demonstran sebagai pelaku makar dan terorisme—sejalan dengan prediksi Situational Crisis Communication Theory bahwa strategi non-akomodatif pada krisis beratribusi tanggung jawab tinggi berisiko memperburuk, bukan memulihkan, legitimasi. Dinamika sentimen publik digital, yang didominasi sentimen negatif dan tagar kritis seperti #polisipembunuh pada momen krisis, kontras dengan sentimen positif pada isu populis seperti program MBG, mengonfirmasi sifat terbelah opini publik terhadap pemerintahan ini.

Temuan paling signifikan adalah teridentifikasinya fenomena jeda legitimasi: tingkat kepuasan publik agregat bertahan tinggi (77–80 persen) sepanjang 2025 hingga awal 2026 meski telah terjadi krisis komunikasi serius, sebelum akhirnya terkoreksi tajam menjadi 59,75 persen pada pertengahan 2026 seiring berakumulasinya tekanan ekonomi dan memudarnya efek peredam dari politik distributif jangka pendek. Dengan demikian, tujuan penelitian telah tercapai: gaya komunikasi presiden teridentifikasi dan terkategori, dinamika sentimen publik digital telah dipetakan menggunakan data sekunder yang terverifikasi, dan relasi keduanya dengan indikator legitimasi terukur telah dianalisis untuk merumuskan proposisi jeda legitimasi sebagai kontribusi konseptual penelitian ini.

Penelitian ini memiliki keterbatasan: data sentimen digital yang digunakan bersumber dari publikasi lembaga riset pihak ketiga, bukan pengolahan data mentah primer, sehingga generalisasi temuan kuantitatif sentimen perlu dibaca secara hati-hati. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan pengumpulan dan analisis data primer komentar publik secara longitudinal dengan metode komputasional, serta wawancara mendalam dengan pengamat komunikasi politik dan figur dalam lingkaran komunikasi kepresidenan, guna memperkaya pemahaman atas mekanisme internal pengambilan keputusan strategi komunikasi krisis di Istana.

DAFTAR REFERENSI

- Beetham, D. (1991). *The legitimation of power*. Macmillan.
- Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. *Corporate Reputation Review*, 10(3), 163–176.
- Coombs, W. T. (2015). The value of communication during a crisis: Insights from strategic communication research. *Business Horizons*, 58(2), 141–148.
- Coombs, W. T., & Schmidt, L. (2000). An empirical analysis of image restoration: Texaco's racism crisis. *Journal of Public Relations Research*, 12(2), 163–178.
- CNBC Indonesia. (2026, Februari 9). Survei Indikator Politik ungkap approval rating Prabowo nyaris 80%. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260209074744-4-709322/survei-indikator-politik-ungkap-approval-rating-prabowo-nyaris-80>
- Detik.com. (2025, Agustus 30). Lini masa demo Agustus 2025: Dari joget DPR hingga rumah Sahroni dijarah. detikJabar. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8088075/lini-masa-demo-agustus-2025-dari-joget-dpr-hingga-rumah-sahroni-dijarah>
- Detik.com. (2026, Februari 8). Survei Indikator Politik: Kepuasan kinerja Presiden Prabowo 79,9%. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-8346552/survei-indikator-politik-kepuasan-kinerja-presiden-prabowo-79-9>

- InfoPublik. (2025, November). Mayoritas warga puas atas kinerja Presiden Prabowo. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/946221/mayoritas-warga-puas-atas-kinerja-presiden-prabowo>
- Indikator Politik Indonesia. (2025, November 8). Rilis survei nasional: Evaluasi publik atas kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran [Laporan survei]. <https://indikator.co.id>
- Indopol Survey & Consulting. (2026, Juni). Survei nasional persepsi publik terhadap kinerja pemerintah pusat [Laporan survei]. Dikutip dalam JPNN.com. <https://m.jpnn.com/amp/news/survei-indopol-approval-rating-prabowo-turun-drastis-ke-5975>
- Investortrust.id. (2025, Januari 27). Survei Indikator: 79,3% masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. <https://investortrust.id/national/54582/survei-indikator-79-3-masyarakat-puas-terhadap-kinerja-presiden-prabowo>
- JPNN.com. (2026, Juni 9). Survei Indopol: Approval rating Prabowo turun drastis ke 59,75%. <https://m.jpnn.com/amp/news/survei-indopol-approval-rating-prabowo-turun-drastis-ke-5975>
- Jurnal Penelitian Serambi Hukum. (2025). Perlindungan hak asasi manusia versus keamanan negara: Analisis tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi penolakan kenaikan tunjangan DPR (25–31 Agustus 2025). Jurnal Penelitian Serambi Hukum. <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1404>
- KBR.ID. (2025, September 4). Dampak pidato presiden yang sebut makar dan terorisme dalam aksi demonstrasi. <https://kbr.id/articles/ragam/dampak-pidato-presiden-yang-sebut-makar-dan-terorisme-dalam-aksi-demonstrasi>
- Kompas.com. (2025, September 2). Membaca sikap Prabowo atas demo. Kompas Nasional. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/02/14001221/membaca-sikap-prabowo-atas-demo>
- Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). Sage Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage Publications.
- Noelle-Neumann, E. (1984). The spiral of silence: Public opinion—our social skin. University of Chicago Press.
- Pew Research Center. (2014, Agustus 26). Social media and the 'spiral of silence'. Pew Research Center.
- Jurnal CORE: Journal of Communication Research. (2025). Peran media sosial dalam mengkonstruksi opini publik terkait kebijakan pemerintah: Studi kasus wacana publik tahun 2025. CORE: Journal of Communication Research. <https://journal.unpacti.ac.id/index.php/CORE/article/view/2223>
- Jurnal CORE: Journal of Communication Research. (2025). Strategi komunikasi politik dalam menangani krisis. CORE: Journal of Communication Research. <https://journal.unpacti.ac.id/index.php/CORE/article/download/2219/1149/>

- Tempo.co. (2025, September 2). Drone Emprit: Tagar polisi pembunuh ramai di media sosial saat Affan Kurniawan tewas. <https://www.tempo.co/politik/drone-emprit-tagar-polisi-pembunuh-ramai-di-media-sosial-saat-affan-kurniawan-tewas-2064763>
- Tempo.co. (2025, September 2). Narasi Prabowo menyikapi demonstrasi [Analisis data]. Tempo Data Science. <https://www.tempo.co/data/data/narasi-prabowo-menyikapi-demonstrasi-2066248>
- Tempo.co. (2025, September 2). Pidato lengkap Prabowo menyikapi demo berujung penjarahan. <https://www.tempo.co/politik/pidato-lengkap-prabowo-menyikapi-demo-berujung-penjarahan-2065173>
- Tempo.co. (2026, Februari 9). Sederet hasil survei Indikator Politik soal kinerja Prabowo. <https://www.tempo.co/politik/sederet-hasil-survei-indikator-politik-soal-kinerja-prabowo-2114026>
- The Conversation Indonesia. (2025, September 6). Prabowo sebut demo sebagai makar dan terorisme rakyat berpotensi makin marah. <https://theconversation.com/prabowo-sebut-demo-sebagai-makar-dan-terorisme-rakyat-berpotensi-makin-marah-264363>
- Wijayanto. (2022). Kajian kritis komunikasi krisis: Belajar dari kerumitan komunikasi pemerintah menghadapi pandemi Covid-19. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/44790>
- Wikipedia bahasa Indonesia. (2026). Unjuk rasa di Indonesia 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa_di_Indonesia_2025
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.